

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Petani Hortikultura Ambon

Muhtar^{1*}, Atikah Khairunnisa¹, Mukhlis Fataruba¹

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Indonesia

Korespondensi author : muhtar@lecturer.unpatti.ac.id

Diserahkan tanggal 2 Februari 2026 | Diterima tanggal 13 Maret 2026 | Diterbitkan tanggal 15 April 2026

Abstract: *This study analyzed local government policy for strengthening horticultural farmer institutions in Kranjang Hamlet, Wayame Village, Teluk Ambon District. Horticultural farmers had established several farmer groups and maintained palih, a rotating mutual-labor system that supported cultivation from land preparation to harvesting. Nevertheless, their collective capacity was not fully connected to infrastructure, seasonal finance, continuous extension, and collective marketing. The study used a qualitative case-study design based on interviews, observation, and documentation collected in 2023-2024. Data were organized into five themes: institutional organization, agricultural infrastructure, finance and production inputs, extension, and market relations. The findings show that local cooperation was relatively strong, while government support remained fragmented and was dominated by occasional seed and fertilizer assistance. Farmers cultivated rented land located far from their settlement and depended on local collectors to distribute perishable produce. The study concludes that institutional strengthening should use existing farmer groups as integrated delivery platforms for regular extension, seasonal credit, shared logistics, transparent input management, and collective marketing. Such policy must formalize essential management functions without displacing locally embedded cooperation.*

Keywords: *farmer institutions, horticulture, local government policy, social capital, collective action*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan petani hortikultura di Dusun Kranjang, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon. Petani hortikultura telah membentuk sejumlah kelompok tani dan mempertahankan sistem palih, yaitu kerja gotong royong bergilir yang mendukung kegiatan sejak pembukaan lahan hingga panen. Meskipun demikian, kapasitas kolektif tersebut belum terhubung secara kuat dengan infrastruktur, pembiayaan musiman, penyuluhan berkelanjutan, dan pemasaran kolektif. Penelitian menggunakan desain studi kasus kualitatif berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dihimpun pada 2023-2024. Data dianalisis melalui lima tema, yaitu organisasi kelembagaan, infrastruktur pertanian, modal dan sarana produksi, penyuluhan, serta relasi pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama internal petani relatif kuat, sedangkan dukungan pemerintah masih terfragmentasi dan lebih banyak berbentuk bantuan bibit serta pupuk yang bersifat sesaat. Petani menggarap lahan sewa yang jauh dari permukiman dan bergantung pada papalele untuk menyalurkan komoditas yang mudah rusak. Penguatan kelembagaan perlu menjadikan kelompok tani sebagai platform terpadu bagi penyuluhan rutin, kredit musiman, logistik bersama, pengelolaan bantuan yang transparan, dan pemasaran kolektif tanpa menghilangkan praktik kerja sama lokal.

Kata Kunci: kelembagaan petani, hortikultura, kebijakan pemerintah daerah, modal sosial, tindakan kolektif

Copyright © 2026, Muhtar, Khairunnisa, Fatarbua

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



PENDAHULUAN

Petani kecil memegang peranan penting dalam penyediaan pangan, penciptaan kesempatan kerja, dan keberlanjutan ekonomi perdesaan, tetapi mereka beroperasi dalam struktur usaha yang tidak seimbang. Keterbatasan modal kerja, tingginya biaya transaksi, risiko produksi, lemahnya akses teknologi, serta ketergantungan pada perantara menyebabkan petani sulit memperoleh nilai tambah yang sepadan dengan kontribusinya. Kerentanan tersebut semakin besar pada komoditas hortikultura karena hasil panen mudah rusak, memerlukan penanganan cepat, dan menghadapi fluktuasi harga yang tajam. Berbagai kajian menunjukkan bahwa persoalan petani kecil bukan semata-mata rendahnya kapasitas produksi, melainkan juga lemahnya hubungan mereka dengan sistem pembiayaan, penyuluhan, infrastruktur, dan pasar (Touch et al., 2024; Sudaryanto et al., 2023). Kondisi ini tampak di Dusun Kranjang, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, tempat petani telah lama mengembangkan usaha sayuran melalui kelompok tani, tetapi masih menghadapi jarak kebun yang jauh, keterbatasan modal, dukungan penyuluhan yang tidak berkelanjutan, serta ketergantungan pada papalele dalam pemasaran hasil.

Kelembagaan petani secara teoritis dapat mengurangi berbagai keterbatasan tersebut melalui tindakan kolektif. Kelompok tani dan koperasi dapat menggabungkan volume produksi,

mengoordinasikan pembelian sarana produksi, menyebarkan pengetahuan, menurunkan biaya transaksi, serta memperkuat posisi tawar anggota. Kajian mengenai koperasi pertanian menunjukkan bahwa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hanya muncul ketika organisasi memiliki tata kelola yang sehat dan partisipasi anggota yang bermakna (Candemir et al., 2021; Qorri & Felföldi, 2024). Dalam konteks Indonesia, partisipasi aktif dalam kelompok tani berkaitan dengan penerapan praktik pertanian berkelanjutan, sedangkan efektivitas penyuluhan dipengaruhi oleh kualitas interaksi, pemanfaatan sumber daya, dan proses pembelajaran yang terus-menerus (Sukayat et al., 2023; Salam et al., 2024). Modal sosial lokal juga terbukti penting bagi ketahanan pertanian, tetapi dampaknya lebih besar ketika kepercayaan internal terhubung dengan lembaga pemerintah, pembiayaan, dan jaringan pasar (Nugraha et al., 2021; Ambayoen et al., 2025; Haryono et al., 2024).

Sebagian penelitian terdahulu menilai keanggotaan kelompok tani, akses kredit, penyuluhan, atau pemasaran sebagai faktor yang berdiri sendiri. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana petani mengalami kombinasi dukungan kebijakan dalam satu ruang kelembagaan, khususnya pada komunitas kepulauan di Indonesia bagian timur. Kasus Kranjang memperlihatkan paradoks yang relevan: petani mempunyai kerja sama horizontal yang kuat melalui kelompok tani, hubungan kekerabatan, dan sistem palih, tetapi hubungan vertikal dengan sumber daya pemerintah dan pasar belum terlembagakan secara berkelanjutan. Artikel ini berargumen bahwa masalah utama bukan ketiadaan organisasi petani, melainkan lemahnya kemampuan kelembagaan untuk menghubungkan kerja kolektif lokal dengan infrastruktur, pembiayaan, penyuluhan, dan pemasaran. Kebaruan kajian terletak pada penempatan kelompok tani sebagai platform integrasi kebijakan, bukan sekadar penerima bantuan atau saluran administratif program pemerintah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dukungan pemerintah daerah dalam penguatan kelembagaan petani hortikultura di Dusun Kranjang serta mengidentifikasi kesenjangan antara kapasitas kolektif petani dan layanan eksternal yang mereka terima. Kajian difokuskan pada organisasi kelompok, infrastruktur pendukung, modal dan sarana produksi, penyuluhan, serta relasi pemasaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada 2013-2014, kemudian dianalisis secara tematik dengan membandingkan bukti lapangan, tujuan kebijakan penguatan kelembagaan petani, dan temuan penelitian terdahulu.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus karena berupaya memahami secara mendalam pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan dalam konteks sosial, ekonomi, dan geografis yang spesifik. Lokasi penelitian berada di Dusun Kranjang, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Data lapangan dihimpun pada 2023-2024 dan diperlakukan sebagai data historis yang menggambarkan kondisi kelembagaan petani pada periode tersebut. Unit analisis penelitian adalah hubungan antara kelompok petani hortikultura dengan pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, penyuluh, pemilik lahan, dan pelaku pemasaran.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam kegiatan pertanian serta pengelolaan kelembagaan. Kategori informan mencakup pimpinan koperasi, pimpinan gabungan kelompok tani, ketua kelompok tani hortikultura, dan petani hortikultura. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung terhadap kondisi kelompok dan aktivitas usaha tani, serta dokumentasi profil wilayah dan catatan kelembagaan. Dokumen sumber tidak menyediakan jumlah informan secara lengkap maupun transkrip wawancara yang seragam; karena itu, penelitian tidak melakukan generalisasi statistik dan tidak menambahkan jumlah responden yang tidak tercatat.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap. Pertama, data dipilah berdasarkan informasi mengenai organisasi kelompok, lahan, produksi, bantuan pemerintah, penyuluhan, pembiayaan, dan pemasaran. Kedua, data dikodekan ke dalam lima tema utama, yaitu organisasi kelembagaan, infrastruktur pertanian, modal dan sarana produksi, penyuluhan dan penguatan kapasitas, serta relasi pasar. Ketiga, hubungan antartema dianalisis untuk membedakan kapasitas internal kelompok dengan dukungan eksternal. Keempat, temuan dibandingkan dengan literatur mengenai tindakan kolektif, modal sosial, koperasi pertanian, dan kebijakan pemerintah. Keabsahan interpretasi dijaga melalui perbandingan antara hasil wawancara, catatan observasi, profil kelompok, dan dokumen wilayah sebagaimana lazim dalam analisis kualitatif (Creswell & Poth, 2018; Miles et al., 2020).

PEMBAHASAN

Basis Kelembagaan dan Kerja Kolektif Petani

Pertanian hortikultura merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama masyarakat RW 09 Dusun Kranjang. Petani telah menggarap lahan petuanan Negeri Wakal sejak 1989 melalui mekanisme sewa tahunan yang dinegosiasikan antara pemerintah dusun, petani, dan wakil keluarga pemilik lahan. Setiap petani berkontribusi terhadap pembayaran sewa, sedangkan luas lahan yang dikelola bergantung pada kemampuan tenaga kerja dan modal keluarga. Rata-rata keluarga menggarap sekitar satu sampai dua hektare. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah dusun telah menjalankan fungsi perantara kelembagaan, tetapi petani tetap menanggung ketidakpastian dan biaya transaksi karena lahan produksi bukan milik mereka sendiri.

Kegiatan produksi dilaksanakan melalui rumah tangga dan kelompok tani. Data lapangan mencatat Kelompok Tani Lapandewa Jaya dengan 20 anggota, Kelompok Wanita Tani dengan 10 anggota, Kelompok Tani Pali Subur Makmur dengan 13 anggota, serta Kelompok Tani Batu Tangga dengan 20 anggota. Selain itu, terdapat kelompok petani yang menyewa lahan di Hative Besar dengan jumlah sekitar 15-20 anggota per kelompok. Kerja sama mereka didasarkan pada sistem palih, yaitu gotong royong bergilir yang diterapkan sejak pembukaan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen. Palih menekan kebutuhan biaya tenaga kerja tunai, membagi beban pekerjaan berat, dan mempertahankan kewajiban timbal balik antarkeluarga. Dengan demikian, kelembagaan petani Kranjang tidak dimulai dari kondisi individualistik, tetapi dari modal sosial internal yang relatif kuat.

Komoditas yang diusahakan meliputi terong, kol, kacang panjang, tomat, petsai, sawi, cabai, pare, dan bawang merah. Produksi dari lahan Wakal dilaporkan berkisar lima sampai sepuluh ton dalam satu musim panen sekitar dua bulan. Angka tersebut merupakan estimasi deskriptif lapangan, bukan statistik produksi yang diaudit. Namun, data ini memperlihatkan bahwa kelompok bukan hanya wadah sosial, melainkan mengoordinasikan volume komoditas yang bernilai ekonomi dan mudah rusak. Kapasitas tersebut berpotensi ditingkatkan melalui perencanaan produksi, pengendalian mutu, penyediaan logistik, dan pemasaran bersama. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa tindakan kolektif memberi manfaat ketika kelompok mampu menggabungkan kepercayaan internal dengan tata kelola dan jejaring eksternal (Ahmad et al., 2024; Haryono et al., 2024).

Dukungan Infrastruktur Pertanian

Lahan produksi terpisah cukup jauh dari permukiman. Petani menempuh jarak sekitar enam kilometer menuju kebun dengan waktu perjalanan yang dapat mencapai dua jam. Jarak tersebut meningkatkan biaya mobilitas tenaga kerja, pengangkutan sarana produksi, dan distribusi hasil panen. Dokumen lapangan belum menunjukkan adanya paket infrastruktur yang secara khusus dikelola oleh kelompok, seperti jalan usaha tani, kendaraan angkut, irigasi bersama, tempat pengumpulan, penyimpanan sederhana, peti angkut, atau fasilitas pascapanen. Pada komoditas hortikultura, ketiadaan fasilitas tersebut berpengaruh langsung terhadap susut hasil, kecepatan penjualan, dan posisi tawar petani.

Infrastruktur seharusnya tidak dipahami hanya sebagai keluaran konstruksi pemerintah, tetapi sebagai layanan kelembagaan yang dikelola oleh pengguna. Kelompok tani dapat ditetapkan sebagai organisasi pengelola sarana bersama, sehingga tanggung jawab penggunaan, pemeliharaan, pencatatan biaya, dan pembagian manfaat menjadi lebih jelas. Kajian mengenai akses pasar petani kecil menekankan bahwa perbaikan jalan, informasi, koordinasi mutu, dan organisasi kolektif harus berjalan bersamaan agar infrastruktur benar-benar meningkatkan pendapatan (Ma et al., 2024). Dalam konteks Kranjang, prioritas yang realistis mencakup akses angkutan bersama, titik pengumpulan hasil, alat timbang, kemasan yang seragam, serta sistem pengelolaan air yang sesuai dengan kondisi lahan sewa.

Akses Modal dan Sarana Produksi

Dukungan pemerintah terlihat melalui bantuan sarana produksi. Pada 2024, Dinas Pertanian Provinsi memberikan bibit bawang merah, sedangkan Dinas Pertanian Kota memberikan pupuk. Bantuan tersebut mengurangi kebutuhan biaya awal dan memperkenalkan komoditas yang memiliki peluang pasar. Akan tetapi, pola intervensinya masih berupa distribusi input yang terpisah dari rencana pengembangan kelembagaan jangka menengah. Data lapangan tidak menunjukkan adanya dana bergulir kelompok, kredit musiman, pembelian input secara kolektif, rencana usaha kelompok, ataupun pendampingan pengelolaan keuangan yang terhubung dengan bantuan tersebut. Akibatnya, petani tetap membiayai sebagian besar siklus produksi sendiri dan menanggung risiko gagal panen secara individual.

Pembiayaan pertanian perlu disesuaikan dengan siklus tanam, waktu panen, dan kemampuan kelompok dalam mengelola risiko. Literasi keuangan dan desain kredit yang sesuai dapat memperluas peluang investasi, tetapi akses kredit tanpa kemampuan perencanaan justru berpotensi menambah kerentanan (Soekarni et al., 2024). Model yang lebih sesuai bagi Kranjang adalah penggabungan tabungan kelompok, aturan kelayakan yang transparan, kredit berbiaya rendah yang dibayar setelah panen, serta pendampingan penyusunan anggaran produksi. Bantuan bibit dan pupuk juga perlu ditempatkan dalam rencana produksi bersama, disertai pencatatan penerima, penggunaan input, hasil panen, dan evaluasi. Dengan cara itu, bantuan tidak berhenti sebagai transfer barang, melainkan menjadi sarana pembelajaran tata kelola dan akuntabilitas kelompok.

Penyuluhan dan Penguatan Kapasitas

Penyuluhan merupakan salah satu kebutuhan utama yang teridentifikasi dalam penelitian, tetapi belum tampak sebagai rutinitas kelembagaan yang stabil. Dokumen lapangan tidak mencatat jadwal kunjungan penyuluh yang teratur, pelatihan tata kelola kelompok, demplot berkelanjutan, mekanisme konsultasi teknis, maupun evaluasi hasil belajar. Kondisi tersebut tidak berarti bahwa tidak pernah ada kontak penyuluhan, melainkan menunjukkan bahwa fungsi pembelajaran belum terdokumentasi sebagai proses yang terus-menerus dan terhubung dengan rencana kerja kelompok. Dukungan pemerintah dapat menjangkau petani melalui bantuan input, tetapi kapasitas untuk mengubah bantuan menjadi peningkatan pengetahuan dan kemandirian masih terbatas.

Penyuluhan yang efektif tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi sesaat. Penyuluhan harus menghubungkan kebutuhan teknis budidaya, manajemen kelompok, pengelolaan keuangan, adaptasi risiko, dan pemasaran. Penelitian mengenai penyuluhan pertanian menunjukkan bahwa efektivitasnya bergantung pada keterlibatan petani, relevansi materi, penggunaan sumber daya, dan tindak lanjut dalam proses produksi (Salam et al., 2024). Setiap bantuan pemerintah karena itu sebaiknya disertai rencana belajar kelompok, demonstrasi teknis, pencatatan hasil, dan kunjungan evaluasi. Penguatan kapasitas juga harus melibatkan kader petani lokal agar pengetahuan tidak sepenuhnya bergantung pada kehadiran aparatur dari luar komunitas.

Relasi Pasar dan Peran Papalele

Pemasaran hasil pertanian dilakukan melalui enam papalele lokal yang mengambil sayuran dari petani dan membawanya ke pasar. Papalele menjalankan fungsi penting karena menyediakan jaringan pembeli, transportasi, dan kecepatan distribusi bagi komoditas yang mudah rusak. Namun, penguasaan informasi harga, fasilitas angkut, dan hubungan dengan pasar lebih banyak berada pada perantara daripada kelompok tani. Data lapangan belum menunjukkan adanya pencatatan penjualan kelompok, negosiasi harga bersama, jadwal panen terkoordinasi, atau kontrak dengan pedagang dan pengecer. Kelompok dengan demikian lebih berhasil mengoordinasikan tenaga kerja di hulu daripada mengelola rantai nilai di hilir.

Kebijakan tidak perlu menganggap penghapusan perantara sebagai satu-satunya jalan keluar. Persoalan yang lebih penting adalah transparansi, persaingan yang wajar, dan pembagian nilai yang adil. Koperasi pemasaran dapat mengurangi biaya transaksi dan memperkuat posisi petani, tetapi memerlukan manajemen profesional, disiplin volume, mutu yang seragam, serta kepercayaan anggota (Candemir et al., 2021; Qorri & Felföldi, 2024). Kelompok Kranjang dapat memulai dari fungsi yang sederhana, seperti mencatat harga harian, menyepakati ukuran atau berat komoditas, mengoordinasikan waktu panen, membandingkan penawaran pembeli, dan menyewa angkutan bersama. Hubungan dengan papalele tetap dapat dipertahankan, tetapi harus didasarkan pada informasi yang lebih terbuka dan kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1. Dukungan Kebijakan dan Kesenjangan Kelembagaan Petani Kranjang

Dimensi	Bukti Lapangan	Penilaian Kelembagaan	Respons Prioritas
Organisasi	Beberapa kelompok tani dan sistem palih.	Modal sosial internal kuat, tetapi pengelolaan formal dan koordinasi antarkelompok terbatas.	Penguatan aturan kelompok, pencatatan, kepemimpinan, dan koordinasi antarkelompok.
Infrastruktur	Kebun berjarak sekitar 6 km dan hasil dijual melalui papalele.	Produksi kolektif belum ditopang logistik dan fasilitas pascapanen bersama.	Angkutan, akses kebun, pengelolaan air, titik kumpul, dan alat penanganan bersama.
Modal dan input	Terdapat bantuan bibit dan pupuk; pembiayaan lain banyak ditanggung petani.	Bantuan bersifat sesaat dan belum terhubung dengan kredit musiman atau mekanisme kelompok.	Kredit musiman, tabungan kelompok, pembelian input kolektif, dan pendampingan keuangan.
Penyuluhan	Penyuluhan menjadi kebutuhan, tetapi pendampingan rutin tidak terdokumentasi jelas.	Fungsi pembelajaran belum sekuat kerja sama tenaga petani.	Rencana penyuluhan tahunan, demplot, kader petani, dan evaluasi pembelajaran.
Pemasaran	Enam papalele menyalurkan sayuran ke pasar.	Kelompok bergantung pada perantara dan belum mengelola informasi harga serta penjualan kolektif.	Informasi harga, pencatatan penjualan, logistik kolektif, dan kemitraan pembeli.

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2023-2024.

Model Kebijakan Penguatan Kelembagaan Terintegrasi

Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara modal sosial internal yang kuat dan hubungan eksternal yang lemah. Petani memiliki norma timbal balik, kepemimpinan yang diakui, kebiasaan kerja bersama, serta pengalaman mengelola produksi. Masalah kebijakan karena itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan membentuk kelompok baru. Penambahan organisasi tanpa

fungsi ekonomi dan layanan yang jelas justru berpotensi memperbesar beban administrasi. Pemerintah perlu mengakui kelompok yang telah ada, memetakan kapasitasnya, kemudian memperkuat fungsi yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan dengan penyuluh, lembaga keuangan, pemilik infrastruktur, dan pembeli.

Penguatan kelembagaan perlu menggunakan kelompok tani sebagai platform pelayanan terpadu. Pertama, pengembangan organisasi diarahkan pada administrasi anggota, rencana produksi, pembukuan, mekanisme keputusan, dan regenerasi kepemimpinan. Kedua, penyuluhan dilaksanakan melalui rencana kerja tahunan dan pendampingan lapangan yang rutin. Ketiga, bantuan input dan pembiayaan dikaitkan dengan anggaran produksi serta mekanisme kelompok yang transparan. Keempat, pembangunan infrastruktur mengikuti kebutuhan mobilitas petani dan karakter komoditas. Kelima, pengembangan pasar diarahkan pada informasi harga, logistik bersama, pencatatan penjualan, serta negosiasi kemitraan. Koordinasi lintas perangkat daerah juga diperlukan agar kebijakan tidak terpecah menjadi program yang berdiri sendiri (Akbar et al., 2025).

Model tersebut harus tetap menghormati keragaman kehidupan dan kelembagaan lokal. Sistem agripangan Indonesia tidak selalu bergerak melalui satu jalur modernisasi yang seragam, melainkan menggabungkan produksi rumah tangga, kekerabatan, hak adat, bantuan pemerintah, dan pasar perantara (Dwiartama et al., 2024). Di Kranjang, formalisasi yang terlalu kaku dapat melemahkan palih dan kepercayaan internal yang justru menopang kegiatan produksi. Pemerintah hanya perlu memformalkan fungsi yang dibutuhkan untuk akuntabilitas dan kemitraan, seperti pencatatan keuangan, standar mutu, pembagian tanggung jawab, serta perjanjian penjualan. Praktik lokal tetap menjadi dasar hubungan sosial kelompok.

Penguatan jejaring eksternal juga harus dilakukan secara bertahap. Modal sosial lokal akan lebih produktif ketika terhubung dengan kapasitas manusia, sumber daya pemerintah, dan hubungan pasar yang dapat dipercaya (Baka et al., 2024; Prayitno et al., 2025). Pemerintah daerah dapat memfasilitasi forum berkala antara kelompok tani, penyuluh, koperasi, lembaga keuangan, papalele, dan calon pembeli. Forum tersebut bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan ruang untuk menyusun kalender tanam, kebutuhan input, jadwal layanan, rencana transportasi, serta evaluasi harga dan penjualan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan diukur dari kemampuan kelompok menyelesaikan masalah produksi dan pasar secara berulang, bukan dari jumlah organisasi atau banyaknya bantuan yang dibagikan.

Keterbatasan Penelitian

Data penelitian menggambarkan kondisi 2023-2024 sehingga tidak dapat digunakan untuk menyatakan keadaan mutakhir kelompok tani, infrastruktur, penyuluhan, atau saluran pemasaran di Dusun Kranjang. Dokumen sumber juga tidak menyediakan jumlah informan secara lengkap, transkrip wawancara penuh, dan data kinerja longitudinal antarkelompok. Keterbatasan tersebut tidak menghilangkan nilai analitis kasus, tetapi membatasi generalisasi dan penerapan rekomendasi secara langsung. Penelitian lanjutan perlu melakukan pemutakhiran melalui pemetaan kelembagaan partisipatif, data produksi dan keuangan kelompok, serta wawancara dengan pemerintah, penyuluh, lembaga keuangan, papalele, dan pembeli.

SIMPULAN

Kebijakan pemerintah daerah di Dusun Kranjang telah mendukung petani hortikultura melalui pengakuan terhadap organisasi petani dan bantuan sarana produksi, tetapi dukungan tersebut belum membentuk sistem penguatan kelembagaan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Petani sebenarnya memiliki fondasi kolektif yang kuat melalui kelompok tani, hubungan kekerabatan, dan sistem palih. Kelemahan utama berada pada kemampuan menghubungkan modal sosial tersebut dengan layanan eksternal: lahan produksi berstatus sewa dan jauh dari permukiman, pembiayaan masih banyak dikelola

secara individual, penyuluhan belum tampak sebagai rutinitas organisasi, sedangkan pemasaran bergantung pada papalele tanpa mekanisme penjualan kolektif yang terdokumentasi. Penguatan kelembagaan perlu menjadikan kelompok tani sebagai platform tetap untuk penyuluhan, kredit musiman, pengelolaan bantuan yang transparan, infrastruktur bersama, dan pemasaran kolektif. Formalisasi harus dibatasi pada fungsi manajerial yang diperlukan bagi akuntabilitas dan kemitraan, tanpa menggantikan kerja sama lokal yang telah berjalan. Karena data bersifat historis, pemutakhiran lapangan diperlukan sebelum rekomendasi diterapkan sebagai keputusan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. R., Shadbolt, N., & Reid, J. (2024). Collective action for rice smallholder's value chain: Insight from Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Co-operative Organization and Management*, 12(1), 100236. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2024.100236>
- Akbar, A., Darma, R., Irawan, A., Fudjaja, L., Amandaria, R., & Akzar, R. (2025). An institutional framework for enhanced food security amidst the COVID-19 pandemic: Strategic implementation and outcomes. *Journal of Agriculture and Food Research*, 21, 101833. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2025.101833>
- Ambayoen, M. A., Hidayat, K., Yuliaty, Y., & Cahyono, E. D. (2025). The roots of resilience: Strengthening agricultural sustainability in Tengger, Indonesia through social capital. *Sustainability*, 17(1), 192. <https://doi.org/10.3390/su17010192>
- Baga, L. M. (2010). Revitalisasi koperasi petani [Naskah tidak diterbitkan]. Institut Pertanian Bogor.
- Baka, W. K., Rianse, I. S., & Zulfikar, Z. (2024). Palm oil business partnership sustainability through the role of social capital and local wisdom: Evidence from palm oil plantations in Indonesia. *Sustainability*, 16(17), 7541. <https://doi.org/10.3390/su16177541>
- Candemir, A., Duvaléix, S., & Latruffe, L. (2021). Agricultural cooperatives and farm sustainability: A literature review. *Journal of Economic Surveys*, 35(4), 1118-1144. <https://doi.org/10.1111/joes.12417>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.
- Dwiartama, A., Akbar, Z. A., Ariefiansyah, R., Maury, H. K., & Ramadhan, S. (2024). Conservation, livelihoods, and agrifood systems in Papua and Jambi, Indonesia: A case for diverse economies. *Sustainability*, 16(5), 1996. <https://doi.org/10.3390/su16051996>
- Haryono, A., Juniarti, I., Matajat, K., Suroso, A. I., & Soesilo, M. (2024). Partnership development of smallholder coffee cultivation: A model for social capital in the global value chain. *Economies*, 12(12), 349. <https://doi.org/10.3390/economies12120349>
- Isnani, W., Muin, N., Iriani, I., Humaedi, M. A., Diniyati, D., Listyawati, A., & Aminudin, A. (2025). Bridging gaps in rural resilience: Smallholder farmers' perceptions of formal and community-based social assistance in Indonesia. *Agricultural and Food Economics*, 13, 70. <https://doi.org/10.1186/s40100-025-00415-0>
- Ma, W., Rahut, D. B., Sonobe, T., & Gong, B. (2024). Linking farmers to markets: Barriers, solutions, and policy options. *Economic Analysis and Policy*, 82, 1102-1112. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2024.05.005>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE.
- Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang pembinaan kelembagaan petani.
- Nugraha, A. T., Prayitno, G., Hasyim, A. W., & Roziqin, F. (2021). Social capital, collective action, and the development of agritourism for sustainable agriculture in rural Indonesia. *Evergreen*, 8(1), 1-12. <https://doi.org/10.5109/4372255>
- Prayitno, G., Fikriyah, Nugraha, A. T., Siankwilimba, E., Wicaksono, A. D., Dinanti, D., Subagiyo, A., Hoque, M. E., & Hiddlestone-Mumford, J. (2025). The role of social and human capital on climate change adaptation in agricultural activities in Indonesia. *Environmental Challenges*, 21, 101353. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2025.101353>

- Qorri, D., & Felföldi, J. (2024). Research trends in agricultural marketing cooperatives: A bibliometric review. *Agriculture*, 14(2), 199. <https://doi.org/10.3390/agriculture14020199>
- Salam, M., Jamil, M. H., Tenriawaru, A. N., Kamarulzaman, N. H., Syam, S. H., Rahmadanih, Ramadhani, A., Bidanghan, A. M., Muslim, A. I., Ali, H. N. B., & Ridwan, M. (2024). The effectiveness of agricultural extension in rice farming in Bantaeng Regency, Indonesia: Employing structural equation modeling in search for the effective ways in educating farmers. *Journal of Agriculture and Food Research*, 18, 101487. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.101487>
- Soekarni, M., Adam, L., Thoha, M., Sarana, J., Ermawati, T., Saptia, Y., Adityawati, S., Sujianto, & Wibowo, M. (2024). Strengthening financial literacy of smallholder farmers through agricultural fintech peer-to-peer lending: Evidence and practical implications. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2359011. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2359011>
- Sudaryanto, T., Erwidodo, Dermoredjo, S. K., Purba, H. J., Rachmawati, R. R., & Irawan, A. R. (2023). Regional rural transformation and its association with household income and poverty incidence in Indonesia in the last two decades. *Journal of Integrative Agriculture*, 22(12), 3596-3609. <https://doi.org/10.1016/j.jia.2023.11.029>
- Sukayat, Y., Setiawan, I., Suharfa Putra, U., & Kurnia, G. (2023). Determining factors for farmers to engage in sustainable agricultural practices: A case from Indonesia. *Sustainability*, 15(13), 10548. <https://doi.org/10.3390/su151310548>
- Touch, V., Tan, D. K. Y., Cook, B. R., Liu, D. L., Cross, R., Tran, T. A., Utomo, A., Yous, S., Grünbühel, C., & Cowie, A. (2024). Smallholder farmers' challenges and opportunities: Implications for agricultural production, environment and food security. *Journal of Environmental Management*, 370, 122536. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122536>